

**PENDEKATAN *SUSTAINABLE LIVELIHOOD*
FRAMEWORK DALAM RANGKA
MEMBONGKAR DOMINASI TENGGULAK
MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN:
Study Kasus pada Pendampingan
Kuliah Kerja Nyata PAR 2012 di Desa Luworo
Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun**

Sri Wigati dan Achmad Room Fitrianto

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Kondisi masyarakat yang terpasung oleh kondisi geografis dan kebijakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur transportasi menyebabkan distribusi produksi pertanian terhambat. Masyarakat mengandalkan jasa tengkulak dan peng-ljon dalam menjual produk pertanian. Kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai jual hasil pertanian tinggi menjadi

sulit. Apa dan bagaimana potensi, kerentanan dan proses dukungan kebijakan di Desa Luworo bisa mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan ijon melalui kegiatan berbasis keagamaan?

Untuk mengetahui persoalan tersebut kami menggunakan pendekatan SLF dengan empat variable analisis yaitu : analisis potensi dan akses sumber daya, analisa kerentanan dan kapasitas, analisa kebijakan, kelembagaan dan proses, serta melihat sejauh mana pengaruh global/pasar terhadap kerentanan masyarakat. Dari pendekatan Sustainable livelihood framework yang dikombinasi dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis budaya mendapatkan hasil yang sangat positif. Pendekatan keagamaan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sebaliknya pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kehidupan beragama masyarakat desa Luworo.

Kata Kunci: ???

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidaklah menjadi warganya mengalami kesejahteraan yang memadai. Salah satu faktor penyebab kemiskinan dari negeri yang maha kaya ini adalah adanya eksploitasi sumber daya yang hanya menjadi *pen-supply* bahan-bahan mentah diekspor ke negara-negara maju. Parahnya ketika barang barang tersebut sudah berupa bahan jadi, Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar.

Bertitik tolak dari kondisi makro Indonesia, Desa Luworo yang memiliki banyak potensi yang dapat menghasilkan hasil pertanian melimpah. Luas lahan persawahan di Desa Luworo mencapai 122.035 Ha sedangkan luas lahan yang digunakan untuk menanam tanaman di ladang atau pekarangan rumah yang memiliki luas total keseluruhan 45.075 Ha dan luas tanah perkebunan 0,450 Ha. Adapun hasil pertanian yang dihasilkan meliputi kacang tanah, kedelai, padi, jagung, kacang hijau dan singkong. Masing-masing komoditi ini dapat

diproduksi selama 3x dalam setahun. Sedangkan singkong dapat diproduksi 1x dalam setahun.¹

Sangat disayangkan kondisi tanah yang subur dan luasnya lahan belum dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Luworo. Ketidakstabilan harga, dan mahalnya pupuk ditengarai menjadi sumber penyebab ketidakmakmuran petani. Tengkulak dan peng-ljon adalah potret pola penjualan yang tidak menguntungkan bagi petani. Dengan penjualan yang bergantung dari tengkulak dan ljon, menjadikan harga komoditas sangat rendah. Tengkulak menjadi pilihan satu-satunya bagi mereka untuk menjual hasil pertanian karena jauhnya pasar. Alasan mereka adalah jika mereka menjual langsung ke pasar maka akan dibutuhkan tambahan biaya pengeluaran untuk biaya transport.

Kendala tersebut menjadikan tengkulak dan ljon semakin mencengkeram masyarakat Luworo dengan pasungan ketidaksejahteraan. Pasalnya, modal awal pertanian yang mereka idamkan akan menghasilkan keuntungan yang banyak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih, semua menjadi sirna. Tengkulak menjadi realitas tak terelakkan dari sisi kehidupan masyarakat Luworo sebagai buruh tani. Realitas yang menekan harga seenaknya, sehingga jauh dari harga pasarannya. Bahkan, tengkulak merasa di atas angin, karena mereka merasa sebagai pihak yang dibutuhkan, sehingga seenaknya saja menekan harga guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahwa realitas sosial yang terjadi merupakan sebuah dominasi (belenggu) melalui penguasaan modal dan penyeragaman opini publik. Kelompok pemodal dalam hal ini adalah tengkulak dan Peng-ljon menjadi kelompok yang dianggap sebagai penentu harga dan masyarakat tidak berhak menentukan harga. Hal tersebut karena berbagai kendala mulai dari distribusi hingga penjualan langsung ke pasar, sehingga harga rendah merupakan kenyataan yang harus mereka hadapi. Sehingga masyarakat Dusun Peron Kelurahan Luworo menjadi elemen masyarakat yang paling lemah.

¹Ningsih dkk. Laporan KKN PAR Mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, 2012.

Fakta sosial semacam itu ada dan masih membelenggu masyarakat. Pola pikir dan kehidupan masyarakat yang sulit keluar dari rutinitas dan merasa hidup pada zona nyaman menjadikan masyarakat Luworo sulit menciptakan inovasi baru sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Pola pikir masyarakat cenderung lebih menginginkan sesuatu dengan mudah dan instan, tidak mau mengerjakan yang lebih sulit di luar kebiasaan, serta kurang berani dalam mengambil resiko untuk melakukan suatu perubahan di luar apa yang telah menjadi rutinitas mereka. Sehingga kehidupan warga Luworo cenderung statis dan kurang berkembang.

B. *Sustainable livelihood Framework (SLF)*

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran tatanan sosial di masyarakat. Dasar dari perubahan sosial adalah proses perubahan pemikiran manusia. Perubahan ini bisa merujuk kepada dinamika nilai nilai atau evolusi budaya sosial. Secara filosofis ini adalah perubahan dialektik dan perubahan drastis yang dialami suatu masyarakat. Perubahan paradigma dari feodalisme menuju kapitalisme adalah contoh perubahan itu. Lebih khusus perubahan paradigma ini bisa diterjemahkan sebagai revolusi sosial. Revolusi sosial dalam Marxism, atau bentuk perubahan sosial lainnya seperti diberikannya hak pilih kepada perempuan atau kebebasan sipil adalah contoh-contoh perubahan sosial.

Perubahan sosial dapat dipengaruhi dan diarahkan oleh kekuatan budaya, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum perubahan ini bisa meliputi perubahan alam dan lingkungan, perubahan institusi sosial, perubahan perilaku sosial atau perubahan hubungan sosial. Dalam menjelaskan tentang perubahan sosial, terkadang diperlukan evaluasi data data sejarah guna membangun kesepahaman atas perubahan yang sedang terjadi. Disisi lain dalam mengupas perubahan sosial terdapat tiga teori perubahan sosial yang acapkali digunakan. Pertama, teori evolusi. Kedua, teori fungsionalis, dan ketiga teori konflik.

Teori evolusi ini di dasarkan pada pemikiran Charles Darwin's (1809–1882) dimana dalam teori ini perubahan sosial pasti mengarah pada tujuan tertentu. Untuk itu pada tahap awal perubahan sosial dapat dilihat pada perubahan kelas yang terjadi di masyarakat, dimana derajat sosial mereka mengalami perubahan. Sebagai dampaknya, perubahan kelas yang perlahan ini akan memberikan atribut tersendiri bagi perilaku budaya diantara mereka dan perubahan perilaku.

Auguste Comte dan Emile Durkheim melihat perubahan sosial sebagai pergeseran masyarakat dari struktur yang sederhana menuju struktur yang lebih *complex*. Begitu juga Herbert Spencer yang membandingkan kelompok masyarakat sebagai makhluk hidup yang selalu melakukan adaptasi dan perubahan tiada berakhir. Secara singkat perubahan sosial menurut mereka adalah sebagai tahapan perubahan atau evolusi untuk mencapai tujuan bersama. Namun demikian ada juga pandangan yang melihat perubahan sosial ini sebagai perubahan *multilinear* dibanding perubahan *unilinear*. Perubahan *multilinear* teori di dasarkan kepada perubahan yang muncul dalam beberapa jalan atau metode namun tidak menutup kemungkinan mengarah pada tujuan yang sama. Teori *multilinear* menggaris bawahi bila perubahan komunitas masyarakat dapat terjadi secara perlahan dengan berbagai sebab dan faktor yang mempengaruhi.

Teori fungsionalis melihat perubahan sosial ini sebagai proses perbaikan masyarakat bukan apa yang akan merubah masyarakat. Talcott Parsons (1902–1979) melihat komunitas ini sebagai teritori alamiah yang stabil dan seimbang. Dalam hal ini masyarakat umumnya mengalami perubahan *toward a state of homeostasis*. Teori keseimbangan melihat perubahan sosial ini sebagai satu syarat untuk menyesuaikan diri dengan berbagai aspek. Ketika penyesuaian ini tidak muncul maka, keseimbangan akan hilang dan akan membahasakan kondisi sosial. Teori ini sebetulnya memiliki persamaan dengan teori evolusi namun teori keseimbangan mendasarkan pada stabilitas dan keseimbangan.

Kelemahan dari teori fungsionalis adalah meminimalisasi dampak perubahan sosial. Hal ini dikarenakan teori ini lebih mengedepankan proses dari pada hasil menyeluruh. Lebih lanjut juga

dapat dilihat bila teori ini juga mengabaikan penggunaan dan pengaruh dari kekuatan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan penyatuan. Sedang teori konflik melihat perubahan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo yang dibangun oleh proses proses masa lalu. Perubahan ini muncul karena adanya pengulangan ketidakadilan sosial dan ketidaksejajaran sosial.

Karl Marx melihat bila perubahan sosial adalah proses proaktif dan tidak bergantung tindakan pasif masyarakat meskipun mereka mengalami penindasan maupun eksploitasi. Dalam hal ini ditekankan kepada kebebasan individu dalam mengontrol dan meraih kemerdekaan mereka. Tidak seperti teori fungsionalis yang mengedepankan stabilitas, Mark melihat konflik adalah perlu dan dibutuhkan untuk menginisiasi perubahan sosial dan menghilangkan ketidaksetaraan masyarakat.

Namun, perubahan perubahan sosial itu tidak bisa dilepaskan dari dari tujuh faktor budaya. Menurut Kreml (2006), tujuh faktor itua adalah seni budaya, komersial, pendidikan, lingkungan, politik, sosial dan spiritual. Kreml menggambarkan faktor-faktor ini sebagai roda budaya. Penjelasan lengkap dari roda budaya diuraikan dalam gambar berikut ini:²



²Kreml, S . Reviving Spirit in Corporate Systems. Masters Dissertation, Institute of Sustainability & Technology Policy, Murdoch University Western Australia. Sumber diagram: Kreml, 2006-(dimodifikasi), 2006.

Dari gambaran bagan diatas dapat dilihat bila perubahan masyarakat tidak bisa dipengaruhi oleh metode dan pendekatan yang sama di setiap kelompok masyarakat. Hal ini karena masyarakat dipengaruhi oleh nilai nilai budaya dan nilai-nilai budaya ini dipengaruhi oleh seni budaya, komersial, pendidikan, lingkungan, politik, sosial dan spiritual.

Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan dalam mengarahkan perubahan. Pertama harus waspada pada proses politik yang ada atau yang sedang berlangsung. Jangan sampai proses perubahan yang dicanangkan menjadi alat politik satu golongan tertentu. Kedua, tingkat kewaspadaan harus optimal terhadap issue yang di usung. Jangan sampai issue atau tema yang di usung menjadi masalah dan memiliki penolakan di masyarakat. Ketiga, harus memiliki nilai tawar yang tinggi dalam memberikan solusi dari isu atau masalah yang diangkat. Keempat, adanya paralelisasi dengan gerakan perubahan sejenis yang sedang berlangsung. Jangan sampai perubahan yang dicanangkan bertolak belakang dengan arus perubahan yang sedang terjadi.

Keempat syarat tersebut menjadi mutlak dibutuhkan dikarenakan proses politik yang tidak sejalan, kesensitifan issue yang kebanyakan menyangkut tradisi dan nilai budaya akan sangat rentan terhadap isue perubahan yang diusung.

Resistensi atau penolakan pada umumnya, akan datang dari orang atau sekelompok orang yang sudah merasa mapan. Dimana perubahan yang diusung akan dapat mengganggu kestabilan dan status kekuasaan, serta privilege yang telah dimiliki selama ini. Untuk mengantisipasi resistensi atau penolakan maka program yang dilakukan disarankan untuk integral dengan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan jaringan yang telah ada. Semua tahapan tahapan kegiatan yang dilakukan harus dilakukan secara terorganisir, jangan sampai terlihat sangat sporadis dan tidak terstruktur.

Greenberg dan Baron memberikan tujuh langkah dalam menghadapi resistensi perubahan³. Pertama, membangun dinamika

³J. Greenberg, RA. dan Baron, R. A. *Behavior in Organization: Understanding and managing the human side of work*. New Jersey: Prentice Hall, 2003, hal.604

politik yang cantik yang menjadi tren dimasyarakat. Kedua mengidentifikasi penolakan yang muncul dan melihat faktor faktor apa yang mempengaruhi penolakan tersebut. Ketiga, melakukan edukasi kepada orang orang tertentu yang bisa dijadikan tenaga penggerak perubahan. Keempat mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat. Kelima menghargai perilaku kosntruktif yang muncul dimasyarakat. Keenam menkreasi organisasi pembelajaran dan terakhir jangan sampai salah dalam memperhitungkan situasi dimasyarakat

2. Sustainable livelihood Framework (SLF)

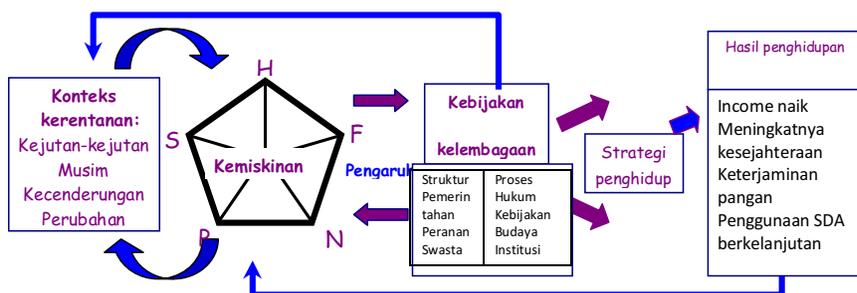
SLF ini memberikan pendekatan menyeluruh dalam mengatasi kendala yang paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat.⁴ Metode ini berfokus pada pemahaman bagaimana individu dan rumah tangga mendapatkan dan menggunakan aset sosial dan ekonomi tertentu untuk mencari peluang lebih lanjut, mengurangi risiko, mengurangi kerentanan dan mempertahankan atau meningkatkan mata pencaharian mereka⁵. Selain itu, kerangka kerja ini membantu semua elemen masyarakat dalam respon kerentanan dan dapat menetapkan prioritas program pembangunan. Secara tidak langsung, SLF menempatkan masyarakat sebagai pusat dari perencanaan. Dimana proses perencanaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, lingkungan politik, masalah manusia yang ada, situasi keuangan dan sumber daya alam.⁶ Bagan 2 menguraikan kompleksitas kerangka penghidupan yang berkelanjutan.⁷

⁴E. Ludi dan R. Slater. Using the sustainable livelihoods framework to understand and tackle poverty. The poverty-wellbeing platform. Retrieved April 23, 2009 from : www.poverty-wellbeing.net/document.php?itemID=2578&langID=

⁵Ibid..

⁶Ibid...

⁷*The sustainable livelihoods framework*. Sumber: DFID,1997 (dimodifikasi); Catatan: S= social; P=political; H= human; N=natural; F= financial



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa aktor dan tekanan yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Grafik ini juga menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dapat menggunakan beberapa strategi dalam membatasi bahaya dan risiko. Selain itu, kerangka kerja ini juga memberikan fleksibilitas kepada elemen masyarakat dalam mengurangi risiko kerentanan. SLF ini dapat menyajikan informasi bagaimana skala prioritas pembangunan diambil oleh elemen masyarakat. Dalam tulisan ini, terdapat empat kebutuhan masyarakat yang berhasil diidentifikasi: kapasitas, penilaian psikososial, dukungan pendidikan, dan program jaringan.⁸ Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat analisis kondisi sosial, lingkungan politik, masalah manusia yang ada, situasi keuangan dan sumber daya alam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A.2.2.3, salah satu hasil akhir dari kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi kerentanan sosial dan untuk menyediakan metode yang lebih berkelanjutan mengeksplorasi sumber daya alam. Oleh karena itu, penggunaan SLF membuat masyarakat menjadi pusat perhatian. Pemerintah, sebagai penyedia pelayanan publik, harus mengurangi masalah yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan infrastruktur pembangunan.

Diharapkan dengan adanya peranan pemerintah yang kuat dalam pelayanan publik, akan selalu berpatokan pada karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga kearifan lokal akan selalu terbangun dalam pembangunan di suatu wilayah. Dengan

⁸E. Ludi & R. Slater, *Using the sustainable livelihoods framework to understand and tackle poverty*, 2008. The poverty-wellbeing platform. Retrieved April 23, 2009 from : www.poverty-wellbeing.net/document.php?itemID=2578&langID=

demikian maka perencanaan pembangunan berbasis budaya ini sangat sesuai apabila dengan menerapkan penggunaan *Sustainable Livelihood Framework* yang dilengkapi dengan metode *Clustering*. *Clustering* yang digunakan disini akan banyak menghasilkan keuntungan. Pengembangan *clustering* ini akan mendukung pertumbuhan industri dan efeknya terhadap proses pembangunan. Dengan lebih spesifik *clustering* bisa menyuntikkan dinamika ekonomi ke wilayah.⁹ Selain teori di atas masih ada lagi teori yaitu menekankan bahwa metode pengelompokan yang dapat menciptakan kesamaan, saling melengkapi, dan hubungan antara perusahaan dan lembaga terkait. Dengan dua hal tersebut di atas diharapkan akan mampu menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang mampu mengadopsi metode secara optimal dengan pendekatan *bottom up*.¹⁰

Sehubungan dengan kasus ketertinggalan ekonomi dusun Peron desa Luworo bila dibanding dengan umumnya kondisi di Kabupaten Madiun, maka pemerintah harus mengklasifikasikan masalah yang terjadi dan menempatkannya di tengah-tengah analisis dalam mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan politik, masalah manusia yang ada, situasi keuangan dan sumber daya alam. Analisis ini akan mengakomodasi kebiasaan yang ada dan membantu untuk memaksimalkan masukan dari relawan-ahli yang ingin berpartisipasi dalam memecahkan masalah ini. Hal ini diyakini bahwa, partisipatif bencana metode mitigasi yang lebih berkelanjutan dan relatif lebih akomodatif terhadap semua kepentingan lokal.

Letak geografis yang terpencil dan kurangnya infrastruktur transportasi menjadi salah satu hambatan pembangunan yang menyebabkan orang untuk memilih meninggalkan suatu daerah dan lebih memilih mengadu nasib di tempat lain. Hal ini diyakini bahwa jika tidak diperbaiki, situasi akan mengurangi daya saing desa. Secara

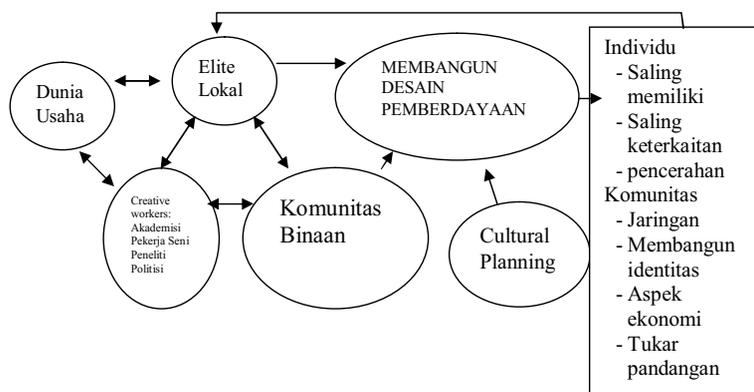
⁹OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. *The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom ?*, (Paris; OECD Publishing, 1999), hal. 182.

¹⁰M. Potter, *The competitive advantages of Nations*. (Basingstoke: Macmillan, 1998).

teoritis, teknologi merupakan salah satu alat yang mendorong daya saing kota. Untuk itu, potensi masyarakat memiliki harus diubah menjadi upaya holistik untuk mengidentifikasi peluang dan risiko, untuk meminimalkan kerentanan dan mempertahankan apa yang masyarakat miliki. Proses ini juga harus mengembangkan toleransi antara orang-orang. Hal ini diyakini bahwa hal ini akan membangun rasa memiliki, keterkaitan dan identifikasi antara para pemangku kepentingan di masyarakat. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bila orang-orang kreatif akan lebih memilih untuk menetap di daerah yang memiliki keterbukaan dan lingkungan yang toleran. Konsep pembangunan ataupun konsep pemberdayaan partisipatif yang digunakan dalam SLF yang dikombinasi dengan prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis budaya akan melibatkan semua masyarakat kreatif seperti para pekerja seni dan mendorong para ahli untuk lebih aktif. Partisipasi orang-orang kreatif akan meningkatkan daya tarik daerah.¹¹

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis budaya

Tahap pertama: Tahap kedua: Tahap Ketiga:
 Proses Inisiasi Pelibatan Keberlanjutan



¹¹R.L. Florida, *Cities and the Creative Class*, (London, Routledge, 2005); sumber diagram: Sonn et al. (2002) pada Krempl, (2006) (dimodifikasi)

Gambar itu menunjukkan bahwa aktor sosial yang terlibat dalam memecahkan masalah masyarakat. Hal ini dapat diasumsikan bahwa keterlibatan semua aktor akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan lembaga-lembaga pembangunan. Manfaat ini akan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang terlibat. Misalnya, Masalah kesenjangan ekonomi di Peron, masukan masyarakat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus diambil sebagai kritik dari aktor sosial dalam rangka menciptakan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, budaya masyarakat proses pembangunan dapat memberikan pemantauan yang lebih baik dari implementasi kebijakan melalui pembangunan berbasis partisipasi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Melibatkan semua pelaku sosial, akan menciptakan interaksi yang intensif antara masyarakat, instansi pemerintah dan pihak luar. Dengan pola partisipatif dapat mengurangi hambatan resistensi dan kecurigaan yang sering mencirikan hubungan komunal. Dengan kata lain pelibatan semua pelaku sosial dalam masyarakat berkaitan dengan aset penghidupan yang mempengaruhi masyarakat, seperti konstruksi sosial, situasi politik, potensi sumber daya alam dan faktor keuangan, akan memaksimalkan keterlibatan sumber daya lokal dalam memecahkan masalah. Selain itu, desain ini juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam merancang proses pembangunan berbasis budaya dan potensi. Dalam kasus ketertinggalan dusun Peron, maka pemerintah harus memaksimalkan potensi yang mengelilingi dusun Peron, misalnya untuk mendorong kerajinan yang berbasis ketrampilan warga atau mengurangi ketergantungan warga kepada sistem Ijon atau tengkulak. Bila pemerintah mampu mendorong ini, maka ini akan memecahkan masalah konstruksi sosial.

Dengan melibatkan potensi seluruh sekitarnya daerah sasaran akan mengembangkan komitmen yang lebih baik di kalangan masyarakat. Di sisi lain, metode ini akan melibatkan sumber daya masyarakat lebih dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, akan mengurangi ketergantungan pada input luar. Singkatnya, itu akan membuat pengembangan komunitas yang spontan dan mandiri.

Secara keseluruhan, konsep pemberdayaan berbasis budaya yang mendukung kerangka penghidupan yang berkelanjutan akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan.

3. Metodologi dan Pendekatan dengan SLF

Kamus Cambridge mendefinisikan penelitian sebagai ‘sebuah studi yang terperinci dalam rangka untuk menemukan informasi (baru) atau mencapai pemahaman (baru)’. Demikian pula, kamus Oxford mendefinisikan penelitian sebagai ‘studi yang cermat dari masalah tertentu dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta baru atau informasi baru’. Dari definisi tersebut, penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis yang didasarkan atas masalah-masalah tertentu dalam rangka untuk mencari solusi alternatif.

Sebuah analisis kualitatif dipilih sebagai alat karena menggambarkan perilaku manusia dengan mengeksplorasi kegiatan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa analisis kualitatif memiliki kelemahan. Sebagai contoh, penelitian ini dapat dipengaruhi oleh bias peneliti, yang dapat mengurangi tingkat objektivitas. Meskipun demikian, penelitian kualitatif bisa dibangun dari kombinasi dari data lapangan baru dan data yang ada diperoleh melalui publikasi media yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis obyek penelitian. Hal ini sependapat dengan definisi yang menjabarkan analisis deskriptif sebagai metode penelitian yang menggunakan interaksi atau keterlibatan langsung dengan obyek penelitian. Hal ini juga memperkuat bila analisis kualitatif memiliki keunggulan yang bisa menangkap fenomena sosial yang ada dan mudah beradaptasi dengan teori substantif tertentu yang diperlukan untuk menganalisis fenomena. Disisi lain, tidak dapat disangkal bila pendekatan kualitatif akan cenderung merasionalisasi temuan peneliti di lapangan terlebih bila temuan tersebut diambil dari pengalaman pribadi¹²

¹²C. Glesne, dan A. Peshkin, *Becoming qualitative researchers : an introduction*. (New York : White Plains, Longman, 1992)

Secara khusus penelitian yang memotret proses perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan pendekatan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dimana dalam pengalihan datanya menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan baik melalui wawancara semi terstruktur, *Focus group discustion* ataupun menggunakan analisis data sekunder. Secara umum penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Sustainable livelihood framework sebagai salah satu bagian dari metode *participatory research* selain mendeteksi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan aset yang dimiliki oleh obyek penelitian. Aset-aset ini meliputi aset sumber daya manusia, sumberdaya alam, kondisi sosial, kondisi financial dan aset fisik yang dimiliki.

Ketertinggalan ekonomi karena “belum” memadainya sarana dan prasarana pembangunan cenderung akan menghasilkan ‘*massive social sadness drama*’. Penggunaan *Sustainable livelihood framework* bukannya tidak memiliki kelemahan. Menurut Scoones dan Kelman & Mather karena kebanyakan focus SLF hanya pada perspektif lokal yang menjadikan teori ini gagal untuk berkomunikasi tidak hanya dengan pembuat kebijakan, tetapi juga dengan proses globalisasi ekonomi¹³. Terlebih lebih apabila muncul kebijakan yang direkomendasi berbeda dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.¹⁴ Sebagai contoh: pembangunan infrastruktur desa yang berdasarkan pada program hibah pemerintah daerah yang berasumsi akan meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian desa. Namun pada kenyataannya menjadikan alat bagi tengkulak dan pengepul mempermudah transportasinya dalam menghimpun produksi primer warga. Sehingga menjadikan warga lebih tergantung kepada pengepul atau tengkulak dalam memasarkan hasil buminya. Sehingga ketika ada program lanjutan untuk pengentasan kemiskinan, warga sudah apatis, alih alih meningkatkan kesejahteraan warga, malah hanya menguntungkan segelindir warga yang telah memiliki fasilitas.

¹³I. Kelman, dan T.A. Mather. “Living with volcanoes: The sustainable livelihoods approach for volcano-related opportunities”. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, vol. 172, 2008. no. 3-4, pp. 189-198.

Sehingga apabila terjadi penolakan ditingkat warga, maka SLF tidak akan efektif dalam melaksanakan pergeseran transformatory mendasar dalam ekonomi pedesaan. Ini berarti bahwa penelitian dan kebijakan yang dilakukan telah bergeser jauh dari pemahaman kontekstual, trans-disiplin dan lintas sektoral dari perspektif, setelah kembali ke default diprediksi analisis ekonomi makro. Dengan perkataan lain, ada kurangnya wacana antara lembaga dan gerakan sosial dan praktisi kebijakan pemerintah yang menyebabkan kegagalan. Kegagalan ini akan menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kekuasaan dan politik. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis ekonomi.

B. Kondisi Umum Desa Luworo

Desa Luworo terletak di kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun. Luas wilayah Desa Luworo adalah 318.3350 m² yang terdiri dari tiga dusun dan 17 RT serta 3 RW, masing-masing Luworo 1 yang terdiri dari 4 RT yaitu RT 1-4, Luworo 2 terdiri dari 7 RT yaitu RT 5-11, dan Luworo 3 atau dusun Peron yang terdiri dari 6 RT yaitu RT 12-17. Desa Luworo berbatasan langsung dengan satu kabupaten dan tiga desa. Sebelah utara berbatasan dengan desa Gandul. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Krebet. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kedung Banteng. Dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Ngawi.¹⁵

Dengan sebagian besar masyarakatnya sebagai petani, maka tidak diragukan lagi bahwa tanah Desa Luworo adalah tanah yang subur. Luas lahan persawahannya adalah 122.035Ha. Selain sawah, masyarakat biasa menanam tanaman mereka di ladang atau pekarangan rumah dengan luas total dengan total keseluruhan 45.075 Ha dan perkebunan 0,450Ha. Penggunaan lahan untuk prasarana umum seluas 44.291 Ha dan untuk pemukiman warga sendiri 94.299Ha. Lahan yang digunakan untuk kuburan seluas

¹⁴I. Scoones, Livelihoods perspectives and rural development, *Journal of Peasant Studies* 2009, 36:1,171-196.

¹⁵Ningsih dkk. *Laporan KKN PAR Mahasiswa IAIN Sunan Ampel*. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, 2012.

12.285. Di Desa Luworo juga terdapat perkantoran dengan luas 0,250 Ha.

C. Temuan Lapangan dalam kerangka *Sustainable livelihood framework*

Sustainable livelihood framework (SLF) adalah kerangka kerja yang mengedepankan pada pemetaan terhadap potensi yang dimiliki. Baik secara material maupun non material akan dapat diklasifikasikan dan melihat segala potensi yang ada. Tahapan-tahapan dalam SLF ini diantaranya adalah pendataan terhadap kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan yang ada dimasyarakat. Kerentanan yang dilihat antara lain kejutan yang terjadi pada perubahan masyarakat misalkan karena bencana alam atau adanya perubahan struktur pemerintahan dan politik. Tahapan *kedua* adalah dengan Pemetaan aset, dimana pemetaan aset ini meliputi pemetaan aset sumber daya manusia, sumberdaya alam, kondisi sosial, kondisi financial dan aset fisik yang dimiliki. Tahap *ketiga* adalah Transformasi proses perubahan struktur dimana didalamnya terdapat perubahan institutional, perubahan hukum dan peraturan pemerintah. Tahap *keempat* adalah Penetapan strategi kehidupan dimana terdapat kesepakatan antara komunitas terhadap intervensi yang diberikan untuk membangun atau memperbaiki keadaan. Tahapan kelima adalah munculnya *livehood outcome* dimana bisa dilihat adanya peningkatan pendapatan masyarakat, mudahnya masyarakat mengakses kebutuhan pokok mereka dan terbebasnya (berkurangnya) dari pengaruh negatif yang membelenggu. Dalam kasus di desa Luworo ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap Peng-ijon dan tengkulak dalam kehidupan mereka.

SLF ini bukan hanya satu satu cara yang baku untuk melihat pemetaan potensi suatu masyarakat. Masih diperlukan unsur lain sebagai pendukung untuk melihat hal tersebut. *Pertama* adalah modifikasi sosial atau intervensi sosial. Modifikasi ini dimaksudkan adalah untuk memunculkan potensi yang ada dalam suatu wilayah. *Kedua* adalah adaptasi yang mana hal ini sangat diperlukan untuk menyeimbangkan dari berbagai elemen dengan adaptasi maka akan

muncul kesemimbangan antar elemen. Ketiga dibuat sesuai dengan situasi lokal adalah harus memahami sebuah karakter wilayah yang sangat berbeda dengan wilayah lain. Keempat adalah dibuat sesuai dengan prioritas lokal yang jelas akan memberikan potensi khusus atau ciri khusus yang berbeda dengan wilayah yang lain.

Untuk lebih detail rincian yang ada dalam suatu masyarakat makan kita akan melihat adanya aset penghidupan yang ada dalam suatu masyarakat.

1. Pemetaan Aset Penghidupan

Penduduk Desa Luworo berjumlah 3992; 1969 laki-laki dan 2.023 perempuan. Penduduk usia produktif berjumlah 2594 dan non produktif berjumlah 1398. Ditinjau dari banyaknya penduduk usia produktif, SDM yang ada di desa ini berpotensi besar memajukan perekonomian desa dengan tenaga mereka dan ide-ide kreatif untuk berwira usaha. Namun pada kenyataannya, dari jumlah usia produktif tersebut hanya 855 yang sudah memiliki pekerjaan, sedangkan sisanya pengangguran.

Terdapat tiga kategori rumah penduduk yang dihasilkan dari pemetaan potensi fisik yaitu a) penghidupan sangat layak; b) penghidupan tidak layak; c) penghidupan sangat tidak layak.

Kategori pertama, rumah yang memiliki kategori berpenghidupan sangat layak ditandai dengan kondisi bangunan rumah yang sudah berupa rumah *gedong*, berlantai keramik, dan beratap genteng. Selain kondisi rumah, dari pengeluaran ekonomi juga dapat ditarik hubungan penghidupan sangat layak ditandai dengan pengeluaran yang banyak pula. Dari pengeluaran, bisa ditarik sebuah gambaran mengenai barang apa saja (*furniture*) yang ada di rumah tersebut. Dari survei yang telah dilakukan, diketahui rata-rata pengeluaran keluarga kategori penghidupan layak adalah e" Rp. 300.000,00

Kategori kedua, rumah dengan kategori berpenghidupan tidak layak. Rumah dengan kategori ini umumnya masih bertipe joglo sederhana atau bahkan *srotong* dengan dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya berupa tanah. Rumah bertipe joglo menunjukkan

penghuninya lebih 'makmur' daripada rumah bertipe *srotong*. Warga dengan kategori penghidupan tidak layak ini rata-rata mengeluarkan d" Rp. 50.000,00 per bulannya untuk anggaran belanja mereka.

Kategori ketiga, adalah rumah yang berkategori penghidupan sangat tidak layak. Rumah dengan kategori ini umumnya bertipe *srotong*. Selain itu rumah ini beratapnya berupa damen atau jerami. Dindingnya terbuat dari gedek. Lantainya berupa tanah yang sudah padat. Tidak ada MCK dirumahnya.

Dari survey yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN 2012 IAIN Sunan Ampel ternyata hanya 39% rumah di desa Luworo berkategori layak. Lebih detail Jumlah rumah yang berdinginkan tembok hanya 403 bangunan, kayu 520, sedangkan yang bambu berjumlah 303 bangunan rumah.

Mayoritas penduduknya bermatapencaharian petani dan buruh tani. Dua pekerjaan itulah yang menjadi penunjang utama kehidupan warga kedua dusun ini. Selain bertani, mereka biasanya beternak yang sifatnya sebagai tabungan. Profesi lain diantaranya pegawai desa, PNS, Guru, Mantri kesehatan/perawat, pegawai swasta, membuka warung kecil, toko, dan ada juga yang menyewakan lahan pertanian (sawah).

Pendapatan perkapita masyarakat Desa Luworo berkisar antara Rp. 600.000,00. PNS mendapat gaji sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,00, Sama halnya dengan guru, ABRI, dan mantri. Sedangkan untuk pegawai desa hanya memperoleh kurang dari Rp.100.000,00. Warga juga ada yang membuka usaha dagang dirumahnya; ada yang berjualan sayuran, makanan, menjual kebutuhan sehari-hari, bengkel, tengkulak, menjual pupuk, penyewaan bor air, mesin giling padi dan kedelai keliling, pengrajin tas, dan pembuat tempe. Di Desa Luworo ini ada sekitar kurang lebih 15 toko, 5 counter, dan 12 warung nasi dan satu hal yang menarik disini telah ada satu bangunan yang digunakan sebagai warnet. Ada pula yang membuka usaha jasa selep gergaji dengan sebutan "*Serkel*", Selain bekerja sebagai penyelep gergaji, untuk mendapatkan penghasilan tambahan ada pula warga yang bekerja sebagai penyelep kedelai

2. Pemetaan Faktor Kerentanan

Dari Pemetaan aset yang telah dilakukan, diketahui bila kerentanan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, ketiadaan kontrol mandiri terhadap faktor produksi yang dimiliki. *Kedua*, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. *Ketiga*, terindikasi bila masyarakat masih terjebak dalam kesalahan memahami filsafat budaya lokal.¹⁶

Kondisi tanah yang subur dan luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Luworo ternyata belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan warga Luworo. Ketidakstabilan harga, dan mahalnya pupuk ditengarai menjadi sumber penyebab ketidakmakmuran petani. Tengkulak dan Peng-ljon adalah potret pola penjualan yang tidak menguntungkan bagi petani. Dengan penjualan yang menggantungkan dari tengkulak dan Peng-ljon, menjadikan harga komoditas sangat rendah. Tengkulak menjadi pilihan satu-satunya bagi mereka untuk menjual hasil pertanian karena jauhnya pasar. Alasan mereka adalah jika mereka menjual langsung ke pasar maka akan dibutuhkan tambahan biaya pengeluaran untuk biaya transport. Sedangkan Peng-ljon menjadi “dewa” penolong dimana ketika mereka membutuh uang baik untuk biaya cocok tanam atau untuk menutup kebutuhan lainnya namun dibayar dalam bentuk hasil pertanian. Istilah yang muncul model pinjaman ini yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat adalah “pinjam jarum, mengembalikan cagak listrik”. Alasan mereka menggunakan Peng-ljon adalah model pinjamannya yang tidak berbelit dan mudah.

Kendala dan asumsi yang berada di masyarakat tersebut menjadikan tengkulak dan Peng-ljon semakin mencengkeram masyarakat Luworo dengan pasungan ketidaksejahteraan. Pasalnya, modal awal pertanian yang mereka idam-idamkan akan beroleh untung banyak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih, semua sirna. Tengkulak dan Peng-ljon menjadi realitas tak terelakkan dari sisi kehidupan masyarakat Luworo sebagai buruh tani dan petani penggarap. Realitas yang menekan harga seenaknya, sehingga jauh dari

¹⁶Ningsih dkk. *Laporan KKN PAR Mahasiswa IAIN Sunan Ampel*. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, 2012.

harga pasarannya serta pola pengembalian yang tidak wajar menjadikan tengkulak dan Peng-ijon merasa di atas angin, karena mereka merasa sebagai pihak yang dibutuhkan, sehingga seenaknya saja menekan harga guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Secara sederhana dapat disimpulkan Penyebab utama mengapa tengkulak dan peng-ljon sangat dominan adalah (1) masyarakat enggan menjual langsung ke pasar dengan alasan lokasi pasar jauh dari rumah dan ditambah lagi dengan tiadanya transportasi yang beroperasi ke pasar, (2) menjual hasil tani berupa barang mentah sehingga harga jual murah disebabkan oleh kurangnya pemahaman (kreativitas) dan terbatasnya sarana, minat dan tenaga warga dalam mengolah hasil tanam, serta (3) harga patokan tengkulak yang tidak dapat di tawar (diubah), (4) keterbatasan kepada akses informasi untuk mendapatkan pembiayaan dari institusi formal.

Selain faktor kerentanan yang berhasil diamati dari observasi lapangan diatas, juga teridentifikasi enam masalah yang dihadapi oleh warga luworo. Lebih detail dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel Kerentanan yang dihadapi masyarakat Luworo¹⁷

No	Masalah	Faktor Penyebab	Akibat yang dirasakan
1	Pendidikan	Minimnya tenaga pengajar TPQ Minimnya fasilitator dalam pendidikan baik formal maupun non formal Tenaga pengajar kurang fokus, mereka lebih fokus pada pekerjaan Kurangnya dorongan dari orang tua Pesimis yang membudaya di masyarakat	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama Siswa sering diliburkan Siswa tidak mampu mengembangkan pengetahuan secara maksimum Orang tua enggan menyekolahkan anaknya Masyarakat lebih bercermin kepada realita sehingga walaupun sekolah yang tinggi namun ujung-ujung bertani
2	Kesehatan	Minimnya dokter dan bidan desa Tidak meratanya pembagian kartu jamkesmas Sebagian masyarakat masih belum mempunyai MCK yang memadai	Ketika berobat harus ke desa lain Masyarakat miskin kesulitan untuk mendapatkan pengobatan yang layak Kesehatan masyarakat terganggu

¹⁷Hasil FDG Mahasiswa KKN PAR IAIN Sunan Ampel 2012

3. Pemetaan kelembagaan dan proses Kebijakan

Secara kelembagaan, Desa Luworo terletak di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Luas wilayah Desa Luworo adalah 318.3350 m² yang terdiri dari tiga dusun dan 17 RT serta 3 RW, masing-masing Luworo 1 yang terdiri dari 4 RT yaitu RT 1-4, Luworo 2 terdiri dari 7 RT yaitu RT 5-11, dan Luworo 3 atau dusun Peron yang terdiri dari 6 RT yaitu RT 12-17. Selain kelembagaan formal diatas, terdapat tujuh lembaga formal dan informal yang dimiliki oleh desa Luworo ini yaitu Gabungan kelompok Tani, UKM Taman Hidayah, TPA Masjid Baitus Saimah, Arisan Warga, Program Keluarga Harapan, KUBE (Koperasi Usaha Bersama) dan Koperasi wanita gelatik.

Disisi lain warga desa ini juga menerima bantuan untuk menunjang perekonomian mereka. Warga yang tidak mampu, kurang mampu dan janda mendapatkan bantuan dari pemerintahan berupa 4 kambing dan beras 2 kg untuk masing-masing keluarga yang berhak mendapatkannya. Warga mengambil bantuan tersebut di rumah Kepala Dusun di masing-masing Desa Luworo I, Luworo II dan Luworo III. Bantuan tidak hanya berupa hewan atau beras melainkan ada yang berupa uang. Bantuan berupa uang diberikan kepada keluarga yang memiliki anak yang masih balita hingga SMP. Apabila dalam keluarga itu mempunyai 3 anak yang masih dalam kategori balita-SMP, maka ketiga anak tersebut mendapatkan bantuan. Adapun uang yang diberikan sebesar Rp. 250.000 tiap 3 bulan sekali untuk per-anak.

Ada pula bantuan RASKIN (Warga Miskin) yakni mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg tetapi dikarenakan banyak orang atau warga masyarakat yang iri dengan adanya bantuan tersebut yang hanya berlaku bagi RASKIN saja maka perangkat desa meredakan persetujuan itu dengan mengurangi jatah yang sebenarnya 30 kg menjadi 20 kg dan sisanya 10 kg diberikan kepada warga yang tidak termasuk golongan RASKIN.

Dari catatan pemetaan ini juga tercatat bila pada periode KKN PAR 2010 terdapat inisiasi usaha pembuatan tempe dan biogas. Namun pada perkembangannya kedua usaha ini menemui kebuntuan. Untuk industri tempe, usaha ini sempat berjalan selama

5 bulan. Namun kemudian usaha ini jatuh dikarenakan kualitas kedelai yang jelek dan tidak tahan lama sehingga tempe mudah busuk. Disamping itu ketatnya persaingan membuat usaha ini semakin meradang. Pembeli menurun sehingga pada akhirnya usaha ini pun jatuh. Sedangkan untuk usaha biogas mengalami kendala untuk men-*supply* bahan baku dikarenakan jumlah sapi atau ternak yang biasanya men-*supply* sisa kotoran sebagai bahan baku biogas berkurang drastis. Sehingga biogas tidak bisa beroperasi lagi.

4. Penetapan kesepakatan Strategy

Melihat kondisi Desa Luworo merupakan desa yang kaya akan hasil pertanian (sumber daya alam melimpah). Namun mayoritas perekonomian warga terbilang sangat lemah. Terlebih terlihat bila warga juga mulai mengenal budaya instan, dimana bila menginginkan menginginkan sesuatu maka akan ditempuh jalan pintas, praktis dan cepat. Untuk menanggulangi dan mengurangi kenegatifan ini, maka mahasiswa KKN PAR tahun 2012 menginisiasi dan memobilisasi warga untuk membentuk Usaha Kegiatan Masyarakat (UKM) yang berbasis kepada kelompok masyarakat yang aktif beribadah di Masjid al-Hidayah dengan nama UKM Taman Hidayah tanggal 14 Februari 2012. Adapun kegiatan UKM taman hidayah ini adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah ntuk mendapatkan keuntungan, misalnya terbuat dari ubi jalar, kedelai. Tujuan terbentuknya UKM taman hidayah ini adalah *pertama* untuk menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat Luworo. *Kedua* mengurangi angka pengangguran masyarakat Luworo. *Ketiga*, memanfaatkan hasil tani yang melimpah dan murah sehingga terjual cukup mahal. *Keempat*, terciptanya masyarakat luworo yang kreatif dan inovatif. *Kelima* meningkatkan perekonomian masyarakat Luworo. Dan *keenam* agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan lebih terjamin.

Dalam UKM taman hidayah ini juga memiliki sistem gandeng renteng tolong menolong yang diberi nama KUBE. KUBE ini adalah singkatan dari Koperasi Usaha Bersama yang memberikan bantuan kepada warga berupa bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari

supaya dikembangkan untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian keluarga serta mensejahterakan warga. Tiap anggota menyetorkan uang 10.000 kemudian dibelikan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari yang kemudian dijadikan usaha seperti toko-toko sederhana. Apabila uang yang dipinjamkan dari koperasi sudah terkumpul, maka dikembalikan ke koperasi lagi guna dikelola kembali. Perkumpulan untuk anggota KUBE dilaksanakan 1 bulan sekali dan tiap tanggal 15 pertengahan bulan melakukan *kulakan* (belanja).

Selain itu, di masjid “Hidayatullah” Desa Luworo III RT. 13 RW. 03 juga terdapat kegiatan warga berupa arisan tiap minggu dengan bentuk arisan bahan pokok yaitu beras, minyak, gula dan uang sebesar 1000 rupiah. Pengumpulan dilakukan sebelum dan setelah sholat maghrib dan undian dilakukan setelah shalat isya’. Bagi yang namanya keluar ketika diundi maka ia berhak membawa semua bahan-bahan pokok dan beberapa uang untuk digunakan sebaik-baik mungkin. Selain arisan bahan pokok, kelompok jamaah masjid al-Hidayah juga memiliki arisan RT yang diputar tiap tanggal 5 dan tiap anggotanya menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,00.

5. Hambatan

Seperti ditunjukkan dalam roda budaya dan dalam kerangka penghidupan yang berkelanjutan, ada banyak variabel yang terlibat dalam mengarahkan tanggung jawab, seperti situasi politik, kekuasaan lokal dan struktur sosial. Variabel lain adalah perilaku birokrasi. Variabel ini penting karena bisa meningkatkan seperangkat kompleks harapan di masyarakat yang sering tidak dapat direalisasikan. Misalnya, sarana transportasi yang dari dan menuju dusun Peron mengalami kerusakan, perhatian pemerintah belum terlihat sehingga mengakibatkan jalur transportasi menjadi terganggu. Di sisi lain, memang kebijakan pemerintah masih tergantung pada perilaku politisi, yang menyebabkan keterlambatan dalam tindakan untuk mengelola peningkatan sarana prasarana infrastruktur. Akibatnya, upaya perbaikan lambat dan terkonsentrasi hanya pada program yang bersifat “proyek”.

6. Interverensi

Setiap interverensi tidak terlepas dari proses politik dan kesepakatan sosial¹⁸. Interverensi yang diberikan harapannya adalah untuk memberi kepuasan kepada warga. Untuk memberikan kepuasan itu, strategi jangka panjang dalam pengusulan kepada masyarakat harus mempertimbangkan perilaku masyarakat, yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Perubahan masyarakat yang memiliki dimensi jangka panjang bisa menciptakan hasil yang lebih menguntungkan bagi pemilik tanah, dan menciptakan peluang lebih besar untuk investasi¹⁹. Dengan kata lain, interverensi dalam proses merubah perilaku masyarakat harus berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat untuk mendapatkan kerjasama mereka dalam proses perubahan tersebut.

Kesenjangan dalam kebijakan pemerintah merupakan tanda bahwa ada *link* yang hilang dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berbasis kebudayaan, yang dikombinasi dengan *Sustainable Livelihood framework* akan mengurangi kesenjangan yang muncul dari kebijakan pemerintah.

Penguatan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok atau unit kegiatan masyarakat yang berbasis rumah ibadah, dalam hal ini di dusun Peron berbasis Masjid Hidayatullah, bisa dilihat sebagai bentuk interverensi perubahan sosial yang berbasis budaya yang dikombinasi dengan prinsip-prinsip dari *Sustainable Livelihood framework* dalam pelaksanaannya. Perubahan yang terjadi dan upaya jalinan komunikasi yang dibangun antara komunitas, perguruan tinggi dan pemerintah daerah akan memberikan dorongan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan, Masyarakat yang mudah beradaptasi dengan perubahan bisa meningkatkan daya tarik daerah. Meningkatkan daya tarik daerah, seperti Florida (2005) menyatakan, bisa mendorong orang untuk tinggal dan berpartisipasi dalam pem-

¹⁸M. Howlett dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 1995.

¹⁹T. Sterner, *Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management*, 2003.

bangunan kembali. Dalam jangka panjang, hal ini bisa meningkatkan peluang potensial yang bisa diperoleh oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, mengurangi kerentanan, pengembangan jaringan, membangun identitas nasional dan memberikan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam.

7. Rekomendasi

Diperlukan dukungan dan dampingan yang kontinyu dan terstruktur. Dengan hal tersebut maka akan terbangun kondisi yang berkelanjutan antara warga dengan pendamping yang menguraikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan tahap demi tahap sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut akan memudahkan dalam memantau dan mengevaluasi program karena struktur pendampingan dan dukungan yang sama. Permasalahan yang sudah diidentifikasi di awal akan mampu terselesaikan dengan baik dan runtut.

Perlunya komunikasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan pengusaha. Karena pembangunan di negara ini tidak akan mampu terlaksana apabila hanya pemerintah yang berjuang. Banyak hal yang tidak akan mampu ditangani oleh satu pihak, melainkan butuh adanya kerjasama dengan pihak dari luar pemerintah yang akan memacu pembangunan secara cepat. Sebagai contoh adalah peran pengusaha akan mampu membangkitkan gairah pembangunan dengan memberikan lapangan kerja atau sebagai menjadi partner kerja untuk masyarakat. Hal tersebut sudah sangat membantu pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pemerintah dan pengusaha saja akan sulit untuk menyelesaikan secara tepat persoalan mendasar yang ada di masyarakat tanpa adanya reasearch dari para akademisi. Sehingga tiga komponen yang berjuang dan bekerjasama akan terjalin program yang berkesinambungan dalam pembangunan. Dengan demikian akan banyak lagi yang akan mampu dilakukan perguruan tinggi, pengusaha dan pemerintah untuk meningkatkan gairah perekonomian masyarakat yang otomatis akan meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Hal berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah upaya membangun kepercayaan diri warga dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat. Sehingga ketrampilan dan pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Secara tak langsung pula akan mampu meningkatkan kesejahteraan manusia.

D. Penutup

Problem social yang muncul dan dialami oleh masyarakat Luworo adalah problem yang tidak muncul begitu saja, melainkan ada sebuah rekayasa sosial. Rekayasa dalam konteks ini adalah pengkondisian yang dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam tengkulak dan atau peng-ijon (yang nota bene elit sosial) yang memiliki kekuatan finansial sehingga bisa menguasai masyarakat, tentu demi kepentingan kuasa modal dan profit tinggi.

Dengan melakukan hegemoni lewat penekanan harga rendah pada penjualan hasil pertanian, maka tengkulak mampu menjauhkan kesejahteraan dari masyarakat buruh tani di desa Luworo. Melalui pihak yang merasa pembeli tunggal, dan dibutuhkan oleh masyarakat buruh tani, maka tengkulak melakukan determinasi harga rendah pada petani. Lebih jauh, kesejahteraan desa Luworo susah tergapai karena pola pikir sederhana yang mengekang selama ini. Pola pikir semacam itu menjadi batu penghalang karena praktis inovasi dan kemajuan hidup menjadi barang langka, pasalnya segala input ketrampilan, penyuluhan dan lainnya seakan tiada guna dan mentah tanpa keinginan untuk berubah dan kerja keras.

Melalui kegiatan keagamaan dan ekonmi masyarakat yang dilaksanakan berbasis masjid maka banyak warga masyarakat yang menjadi ikut andil dalam kegiatan keagamaan. Sehingga kegiatan syiar agama menjadi lebih nyata. Di sinilah nilai positif dan manfaat masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah rohani saja, secara otomatis menjadi ladang dakwah yang hakiki menawarkan kehidupan saat ini dan kehidupan setelah mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Cliffnotes, (2000). Models of Social Change. Study guide. Retrieved 3 Dec 2012 <http://www.cliffsnotes.com/study_guide/topicArticleId-26957,articleId-26953.html>.
- Howlett , M and Ramesh, M . (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.
- Kelman, I. and T.A. Mather. 2008. "Living with volcanoes: The sustainable livelihoods approach for volcano-related opportunities". Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 172, no. 3-4, pp. 189-198.
- Krempf, S .(2006). Reviving Spirit in Corporate Systems.Masters Dissertation, Institute of Sustainability & Technology Policy, Murdoch University Western Australia.
- Ludi, E & Slater, R. (2008). Using the sustainable livelihoods framework to understand and tackle poverty. The poverty-wellbeing platform. Retrieved April 23, 2009 from : [www.poverty-wellbeing.net/document.php? itemID=2578&langID=](http://www.poverty-wellbeing.net/document.php?itemID=2578&langID=).
- Ningsih dkk. (2012). Laporan KKN PAR Mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- DFID.(1997).The DFID Approach to Sustainable Livelihoods. National Strategy for sustainable development. Retrieved May 4, 2009 from : <http://www.nssd.net/references/SustLiveli/DFIDapproach.htm>.
- OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. (1999).The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom ?Paris; OECD Publishing.
- Potter, M. (1998). The competitive advantages of Nations. Basingstoke: Macmillan.
- Florida, R.L. (2005). Cities and the Creative Class, London, Routledge
- Glesne, C and Peshkin, A. (1992) Becoming qualitative researchers : an introduction. New York : White Plains, Longman.

- Greenberg, J. dan Baron, R. A. (2003). *Behavior in Organization: Understanding and managing the human side of work*. edisi 8. New Jersey: Prentice Hall
- Sterner, T.(2003). *Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management*. Washington DC: RFF Press.
- Scoones, I., (2009). Livelihoods perspectives and rural development, *Journal of Peasan Studies*, 36:1,171-196. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/03066150902820503>
- Combridge Dictionary Online.(n.d). Retrieved March 29, 2009, from: <http://dictionary.cambridge.org/define.asp? key=67155 &dict=CALD> .